



Analisis Dampak Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan IPM terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara 2001-2021

Maria Elpida Manalu^{1*}, Karin Sarah Angelina Siahaan², Joko Suharianto³

¹⁻³Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email: mariaaaamanaluuuu@gmail.com¹, angelinakarina21@gmail.com²,
joko@unimed.ac.id³

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20221

Korespondensi penulis: mariaaaamanaluuuu@gmail.com*

Abstract. *One of the socioeconomic problems faced by every region is poverty. Poverty is a social issue that takes place in the long term, so that until now it is still difficult to overcome. The purpose of this study was to determine the effect of Population, Open Unemployment Rate (TPT), and Human Development Index on Poverty Level in North Sumatra Province. This study uses secondary data analysis in the form of time series data which is quantitative in nature, namely data in the form of numbers. The secondary data used in this study are poverty data, population data, open unemployment rate data and human development index data from 2001 to 2021. These data were obtained from the North Sumatra in Figures (SUDA) document from 2001 to 2021. The results of this study prove that population has a significant effect on the poverty rate of North Sumatra Province, the open unemployment rate variable has no significant effect on the poverty rate of North Sumatra Province, the human development index variable has no significant effect on the poverty rate of North Sumatra Province. Simultaneously, population, open unemployment rate (TPT), and human development index have a significant effect on the poverty rate in North Sumatra province.*

Keywords: *Human Development Index, Open Unemployment Rate, Population, Poverty Rate.*

Abstrak. Salah satu permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi oleh setiap daerah adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan isu sosial yang berlangsung dalam jangka panjang, sehingga hingga saat ini masih sulit untuk diatasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh dari Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan analisis data sekunder berupa data time series yang bersifat kuantitatif, yaitu data yang berupa angka. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni data kemiskinan, data jumlah penduduk, data tingkat pengangguran terbuka dan data indeks pembangunan manusia dari tahun 2001 sampai tahun 2021. Data-data tersebut didapat dari dokumen Sumatera Utara Dalam Angka (SUDA) dari 2001 hingga 2021. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Utara, variabel tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan provinsi Sumatera Utara, variabel indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Utara. Secara simultan, jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Utara.

Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, Populasi, Tingkat Kemiskinan.

1. LATAR BELAKANG

Salah satu permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi oleh setiap daerah adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan isu sosial yang berlangsung dalam jangka panjang, sehingga hingga saat ini masih sulit untuk diatasi. Fenomena ini banyak terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan muncul karena masih ada individu yang belum mampu mengelola kehidupannya hingga mencapai standar yang layak (Purnama, 2017).

Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya menyebabkan berkurangnya produktivitas dan pendapatan.

Kemiskinan disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang tidak terkendali, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pengetahuan dalam mengembangkan sektor ekonomi, meningkatnya angka pengangguran, serta menurunnya pertumbuhan ekonomi. Selain itu, masih terdapat faktor-faktor lain yang turut berkontribusi terhadap munculnya kemiskinan.

Dampak dari tingginya tingkat kemiskinan di suatu daerah antara lain meningkatnya angka kriminalitas, bertambahnya jumlah pengangguran, masalah kesehatan yang berujung pada tingginya angka kematian, serta timbulnya ketidakstabilan sosial dan politik. Untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia, pemerintah terus berupaya meningkatkan pembangunan secara merata di berbagai wilayah guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Fokus pembangunan mencakup bidang kesehatan, pendidikan, keamanan, dan keterampilan masyarakat. Namun, upaya tersebut masih belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka kemiskinan secara signifikan.

Kemiskinan di Indonesia memiliki tiga karakteristik utama. Pertama, mayoritas rumah tangga berada di sekitar garis kemiskinan nasional, sehingga banyak penduduk yang rentan jatuh ke dalam kemiskinan. Kedua, ukuran kemiskinan di Indonesia masih berbasis pada tingkat pendapatan tanpa mempertimbangkan garis kemiskinan yang sebenarnya. Ketiga, luasnya wilayah Indonesia dengan berbagai perbedaan antar daerah menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi karakteristik kemiskinan di negara ini (Kasriyati, 2018).

Tabel 1. Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara 2001-2021

Tahun	Miskin	Penduduk	TPT	IPM
2001	1913040	11,513,973	9.09	80.50
2002	1883890	11,722,548	6.74	68.80
2003	1889400	11,847,075	7.71	69.80
2004	1800100	11,890,399	13.75	71.40
2005	1760228	12,123,360	10.98	72.00
2006	1979702	12,326,678	11.51	72.50
2007	1770000	12,643,494	10.10	72.78
2008	1630000	12,834,371	9.10	73.29
2009	1500000	13,042,317	8.45	73.80
2010	1490000	13,248,386	7.43	67.09
2011	1436400	12,982,204	6.37	67.34
2012	1400400	13,103,596	6.20	67.74
2013	1416400	13,215,401	6.53	68.36
2014	1360600	13,326,307	6.23	68.87
2015	1508140	13,766,851	6.71	69.51
2016	1452600	13,937,797	5.84	70.00

2017	1326600	14,102,911	5.60	70.57
2018	1291900	14,415,390	5.56	71.18
2019	1260500	14,562,550	5.41	71.74
2020	1356700	14,799,360	6.91	71.77
2021	1273070	14,936,150	6.33	72.00

Data BPS Sumut 2001-2021

Salah satu faktor yang diduga berpengaruh terhadap kemiskinan adalah tingginya jumlah penduduk. Menurut teori Malthus, pertumbuhan penduduk yang terus berlanjut diperlukan untuk mendukung peningkatan permintaan. Namun, di sisi lain, lonjakan jumlah penduduk yang terlalu cepat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap permasalahan kemiskinan. Pesatnya pertumbuhan penduduk berkontribusi terhadap keterbelakangan dan semakin mempersempit peluang pembangunan. Jika tidak diimbangi dengan kemajuan dalam aspek pembangunan lainnya, peningkatan jumlah penduduk tidak akan mampu mendorong pertumbuhan permintaan maupun pendapatan (Todaro, 2000:236).

Di negara-negara berkembang, permasalahan kependudukan menjadi faktor utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat pertumbuhan penduduk, sementara ketersediaan lapangan kerja semakin terbatas akibat minimnya investasi. Kondisi ini pada akhirnya meningkatkan angka pengangguran dan memperburuk tingkat kemiskinan di negara-negara tersebut.

Pengangguran terjadi karena perekonomian suatu negara belum mampu menyediakan pekerjaan yang cukup bagi seluruh angkatan kerja yang ada, sehingga sebagian dari mereka tidak terserap dalam dunia kerja. Dalam situasi ini, peran aktif dan inovatif pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja serta mengembangkan kebijakan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Oleh karena itu, pembangunan ekonomi harus difokuskan pada sektor-sektor yang mampu menampung banyak tenaga kerja. Namun, kenyataannya, kebijakan yang diterapkan di beberapa negara justru menyebabkan sebagian masyarakat terjebak dalam kemiskinan. Mereka mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya alam, pekerjaan, serta fasilitas sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya memperburuk ketimpangan ekonomi dan menciptakan kondisi yang semakin mengkhawatirkan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh I Komang Agus Adi Putra dan Sudarsana Arka, disebutkan bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Semakin tinggi angka pengangguran, semakin rendah produktivitas penduduk, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ini kemudian berkontribusi pada meningkatnya tingkat kemiskinan di suatu daerah.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Okta Ryan Pranata Yudha menunjukkan hasil yang berbeda, di mana pengangguran terbuka justru berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Tidak semua individu yang menganggur secara sementara dapat dikategorikan sebagai miskin. Hal ini disebabkan oleh variasi dalam kelompok pengangguran terbuka, yang mencakup mereka yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak aktif mencari kerja karena pesimis terhadap peluang kerja, serta mereka yang telah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Beberapa di antara mereka juga terlibat dalam sektor informal atau memiliki pekerjaan dengan jam kerja yang lebih rendah dari standar yang ditetapkan.

Faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan antara lain bencana alam, penurunan investasi, serta pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai perusahaan. Selain itu, keterpencilan juga berkontribusi terhadap meningkatnya tingkat kemiskinan. Loayza dan Raddatz (2006) menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara lokasi geografis sektor produksi dengan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil sering kali kesulitan memperoleh kebutuhan pokok mereka. Padahal, salah satu faktor penting yang harus diperhatikan adalah kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan dapat diberantas dengan lebih cepat apabila tersedia sumber daya manusia yang berkualitas. Sebaliknya, jika kualitas sumber daya manusia rendah, maka proses untuk keluar dari kemiskinan akan memakan waktu lebih lama. Oleh karena itu, pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan yang terarah serta berkualitas sangat penting dalam menciptakan tenaga kerja yang kompeten (Hendra et al., 2016).

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup seseorang adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini diperkenalkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) pada tahun 1990 dengan tujuan menekankan pentingnya manusia dan sumber daya mereka dalam proses pembangunan suatu wilayah. Secara umum, pembangunan manusia memiliki cakupan yang luas, namun secara mendasar, konsep ini berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan sosial serta kemajuan di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan (Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta 2021, n.d.).

Indikator IPM mencerminkan kinerja rata-rata dalam tiga aspek utama pembangunan manusia, yaitu harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Kesehatan diukur berdasarkan angka harapan hidup saat lahir, sedangkan tingkat pendidikan ditentukan melalui harapan lama sekolah bagi anak usia di bawah tujuh tahun serta rata-rata lama sekolah bagi penduduk berusia 25 tahun ke atas. Sementara itu, standar hidup yang layak diukur berdasarkan tingkat pendapatan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk. IPM yang tinggi berkontribusi

terhadap pertumbuhan ekonomi karena individu dapat lebih produktif dan kreatif. Kreativitas sendiri merupakan elemen penting dalam pengembangan jiwa kewirausahaan, yang dapat menjadi salah satu strategi efektif dalam mengatasi kemiskinan (Hussain et al., 2014).

Selain jumlah penduduk dan tingkat pengangguran, faktor lain yang juga perlu diperhatikan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam lima tahun terakhir, IPM di Provinsi Sumatera Utara terus menunjukkan peningkatan. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah dirancang. Peningkatan ini juga sejalan dengan salah satu target utama pemerintah daerah, yaitu meningkatkan IPM sebagai indikator keberhasilan pembangunan (Zakaria, 2018).

2. KAJIAN TEORITIS

Kemiskinan

Kemiskinan memiliki berbagai definisi dan konsep. Bank Dunia (2000) mengartikan kemiskinan sebagai kondisi kekurangan yang sering diukur berdasarkan tingkat kesejahteraan. Sementara itu, Kuncoro (2006) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi standar hidup minimum, yang mencakup kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Menurut Kuncoro (2006), kemiskinan dapat dikategorikan ke dalam dua jenis. Pertama, kemiskinan absolut, yaitu kondisi di mana seseorang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Kedua, kemiskinan relatif, yang berkaitan dengan proporsi pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing kelompok masyarakat. Dalam pendekatan ini, seseorang dianggap miskin apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, baik dari segi makanan maupun non-makanan, yang diukur berdasarkan pengeluaran.

Kemiskinan merupakan isu penting yang harus diperhatikan, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sharp (dalam Kuncoro, 2006) mengidentifikasi tiga penyebab utama kemiskinan. Pertama, distribusi pendapatan yang tidak merata akibat ketimpangan dalam kepemilikan sumber daya. Kedua, perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Ketiga, ketidaksetaraan dalam akses terhadap modal dan kesempatan.

Jumlah Penduduk

Badan Pusat Statistik (2013) mendefinisikan jumlah penduduk sebagai semua individu yang tinggal di wilayah geografis Indonesia selama minimal enam bulan atau mereka yang tinggal kurang dari enam bulan tetapi memiliki tujuan untuk menetap. Sementara itu, menurut Said (2012), penduduk adalah jumlah individu yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada

waktu tertentu, yang jumlahnya dipengaruhi oleh proses demografi seperti kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk.

Pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu: (a) kelahiran (fertilitas), yakni jumlah bayi yang dilahirkan oleh seorang wanita; (b) kematian (mortalitas), yaitu kondisi di mana seseorang tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, seperti tidak bernapas; dan (c) perpindahan penduduk (migrasi), yaitu mobilitas individu dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan, baik bagi mereka yang belum pernah bekerja maupun yang pernah bekerja sebelumnya. Selain itu, pengangguran terbuka juga mencakup mereka yang sedang mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkannya, serta mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Secara umum, pengangguran merujuk pada jumlah tenaga kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkannya.

Pengangguran merupakan permasalahan yang sering terjadi di berbagai wilayah, terutama di negara berkembang. Menurut Sukirno (2008), pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Sementara itu, Simanjuntak (2003) mendefinisikan pengangguran sebagai individu dalam usia angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali atau hanya bekerja kurang dari dua hari dalam seminggu sebelum dilakukan pencacahan, serta sedang berusaha mencari pekerjaan.

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2016), pengangguran mencakup mereka yang tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak memiliki peluang, serta mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terjadi akibat ketidakseimbangan dalam pasar tenaga kerja.

Dalam pasar tenaga kerja, terdapat kurva permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kurva permintaan tenaga kerja menunjukkan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan atau dipekerjakan oleh perusahaan, dengan kecenderungan menurun pada tingkat upah tertentu. Sebaliknya, kurva penawaran tenaga kerja menggambarkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan oleh rumah tangga, yang memiliki kecenderungan meningkat terhadap tingkat upah. Keseimbangan pasar tenaga kerja terjadi ketika jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sama dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan pada tingkat upah tertentu (Widiyati, 2016).

Indeks Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia berfokus pada pengembangan sumber daya manusia yang selaras dengan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ini mencakup peningkatan kapasitas dasar masyarakat, baik secara fisik maupun mental, sehingga memperluas peluang mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (BPS Indonesia, 2016).

Menurut United Nation Development Programme (UNDP Indonesia), indikator indikator yang dipilih untuk mengukur dimensi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah: Longevity, diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir atau life expectancy of birth dan angka kematian bayi per seribu penduduk. Educational Achievement, diukur dengan dua indikator, yaitu melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (adult literacy rate) dan tahun rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 ke atas (the mean years of schooling). Access to resource, dapat diukur secara makro melalui PDB riil per kapita dengan terminologi purchasing power parity dalam dolar AS dan dapat dilengkapi dengan tingkatan angkatan kerja.

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS Indonesia, 2016), Penghitungan metodologi nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sejak tahun 2011 telah mengalami perubahan. Terdapat beberapa indikator yang berubah diantaranya yaitu: Angka melek huruf pada metode lama diganti dengan angka harapan lama sekolah. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

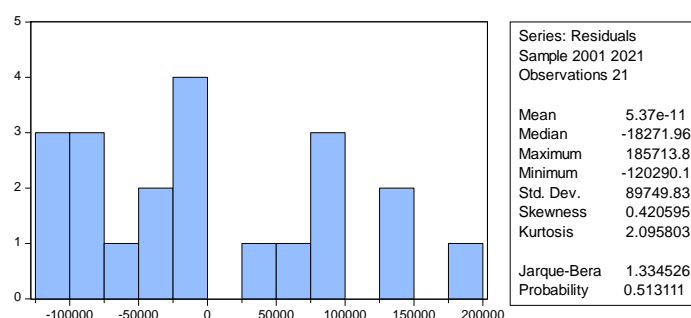
3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dengan data bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan analisis data sekunder berupa data time series yang bersifat kuantitatif, yaitu data yang berupa angka. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan metode runtun waktu (time series) yakni data kemiskinan ;.data jumlah penduduk ; data tingkat pengangguran terbuka dan data indeks pembangunan manusia dari tahun 2001 sampai tahun 2021. Data-data tersebut didapat dari dokumen Sumatera Utara Dalam Angka (SUDA) dari 2001 hingga 2021.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan regresi dan analisis deskriptif, langkah pertama yang harus dilakukan adalah uji normalitas data untuk memastikan apakah data berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2017). Setelah itu, sebelum menganalisis hasil regresi, perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu agar memperoleh hasil yang optimal. Uji asumsi klasik terdiri

dari beberapa tahapan, yaitu uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, serta uji T dan F.



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Residual berdistribusi normal jika memiliki nilai signifikansi $> 0,05 / 5\%$ (Basuki, 2019). Sehingga hipotesis yang digunakan sebagai berikut, H_0 = Residual Berdistribusi Normal dan H_1 = Residual tidak berdistribusi. Berdasarkan grafik 1 diatas, diketahui bahwa nilai probabilitasnya sebesar 0.513111 lebih besar dari 0,05. sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini Residualnya berdistribusi normal atau H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Uji Statistik

Uji statistik digunakan untuk mengevaluasi tingkat ketepatan dan akurasi suatu fungsi atau persamaan dalam memperkirakan data yang sedang dianalisis (Bawono, 2006).

Tabel 2. Output Hasil Regresi

Dependent Variable: MISKIN
Method: Least Squares
Date: 03/10/25 Time: 09:07
Sample: 2001 2021
Included observations: 21

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2875246.	675740.8	4.254954	0.0005
PENDUDUK	-0.167212	0.027730	-6.030079	0.0000
TPT	21921.87	13614.64	1.610168	0.1258
IPM	10035.80	8115.079	1.236686	0.2330
R-squared	0.856714	Mean dependent var		1557127.
Adjusted R-squared	0.831428	S.D. dependent var		237100.2
S.E. of regression	97347.35	Akaike info criterion		25.97960
Sum squared resid	1.61E+11	Schwarz criterion		26.17856
Log likelihood	-268.7858	Hannan-Quinn criter.		26.02278
F-statistic	33.88130	Durbin-Watson stat		1.619538
Prob(F-statistic)	0.000000			

Uji statistik t di dalam penelitian ini dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh diantara variabel independent (Jumlah penduduk, TPT, dan IPM) terhadap variabel dependen (Tingkat Kemiskinan) secara parsial/sendiri. Untuk melakukan uji T diperlukan

perbandingan nilai T_{tabel} dengan T_{hitung} dan dapat melihat nilai signifikannya (kurang dari 0,05). Pada penelitian ini diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1.73961

Diperoleh nilai t_{hitung} pada variabel jumlah penduduk sebesar -6.030079 Nilai negatif (-) pada t_{hitung} menjelaskan bahwa jumlah penduduk berkorelasi negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6.030079 > 1.73961$) dengan nilai Sig. yang lebih kecil dari taraf signifikansi ($0,000 < 0,05$), yang berarti variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara..

Pada variabel TPT didapatkan nilai t_{hitung} sebesar 1.610168 . Nilai positif (+) pada t_{hitung} menjelaskan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) berkorelasi positif terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1.610168 < 1.73961$) dengan nilai Sig yang lebih kecil dari taraf signifikansi ($0,1258 > 0,05$), yang berarti tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara

Pada variabel IPM diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1.236686 . Nilai positif (+) pada t_{hitung} menjelaskan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) berkorelasi positif terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1.236686 < 1.73961$) dengan nilai Sig. yang lebih kecil dari taraf signifikansi ($0,2330 > 0,05$), yang berarti indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Uji statistik F merupakan pengujian secara bersama-sama (simultan) untuk memberikan pembuktian ada maupun tidaknya pengaruh antara seluruh variabel independen terhadap variabel dependen yang dimasukkan dalam model (Ghozali, 2013: 98). Untuk melakukan uji F diperlukan perbandingan nilai F_{tabel} dengan F_{hitung} dan dapat melihat nilai signifikannya (kurang dari 0,05). Pada penelitian ini didapatkan nilai F_{tabel} sebesar 3,24 dan F_{hitung} sebesar 33,88130 . Dapat dinyatakan bahwa nilai f_{hitung} ($33,88130$) $> f_{tabel}$ (3,24) dan nilai Sig. ($0,00 < 0,05$), dalam artian secara perhitungan simultan terdapat pengaruh dari variabel jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.

Hasil Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh perubahan variabel – variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel tidak bebasnya. Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai R-squared sebesar 0.856714 atau sama dengan 85,6%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel jumlah penduduk (X_1), tingkat pengangguran terbuka (X_2) dan indeks pembangunan manusia (X_3) berpengaruh secara bersama – sama terhadap kemiskinan (Y) di Provinsi Sumatera Utara sebesar 87,6% sedangkan sisanya yakni sebesar 14,4% dipengaruhi oleh

variabel lain diluar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Dikarenakan nilai R-squared nya sebesar 85,6 % hampir mendekati 1, maka semua variabel independent hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan agar dapat memprediksi variasi model dependen.

Uji Asumsi klasik

Sebelum melakukan uji regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS), perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu untuk memastikan hasil estimasi yang optimal. Metode OLS akan menghasilkan estimasi terbaik dibandingkan dengan metode lainnya jika asumsi klasik terpenuhi. Namun, jika asumsi tersebut tidak terpenuhi, estimasi yang diperoleh bisa menjadi kurang akurat.

Salah satu uji asumsi klasik yang harus dilakukan adalah uji multikolinearitas. Jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) lebih dari 10, maka terdapat indikasi adanya masalah multikolinearitas di antara variabel independen. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah:

- H0: Tidak terjadi masalah multikolinearitas.
- H1: Terjadi masalah multikolinearitas.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	4.57E+11	1011.885	NA
PENDUDUK	0.000769	296.8146	1.751685
TPT	1.85E+08	26.60110	1.990695
IPM	65854504	736.8921	1.199356

Berdasarkan tabel 3 diatas, diketahui bahwa nilai Centered VIF jumlah penduduk sebesar 1.751686, yang mana tidak lebih kecil dari 10. Nilai Centered VIF pengangguran sebesar 1.818102, yang mana tidak lebih besar dari 10. Nilai Centered VIF tingkat pengangguran terbuka sebesar 1.990695, yang mana tidak lebih besar dari 10. Nilai Centered VIF Indeks Pembangunan Manusia sebesar 1.199356, yang mana tidak lebih besar dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dipenelitian ini, tiga variabel tersebut yakni jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia tidak terjadi persoalan multikolinieritas atau H0 diterima dan H1 ditolak.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	1.820132	Prob. F(3,17)	0.1817
Obs*R-squared	5.105357	Prob. Chi-Square(3)	0.1642
Scaled explained SS	1.833107	Prob. Chi-Square(3)	0.6078

Uji Heteroskedastisitas, jika nilai Probability Obs*R-Squared < dari taraf nyata atau $\alpha = 5\%$, maka terdapat gejala heteroskedastisitas. Sehingga hipotesis yang digunakan yakni sebagai berikut, H_0 = Homoskedastisitas dan H_1 = Heteroskedastisitas.

Berdasarkan tabel 4 diatas, diketahui bahwa nilai Obs*R-Squared hasil sebesar 5.105357 dan nilai probabilitas Chi-Squarenya sebesar 0.1642 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut terbebas dari masalah heteroskedastisitas atau H_0 diterima dan H_1 ditolak

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.630908	Prob. F(2,15)	0.2286
Obs*R-squared	3.750894	Prob. Chi-Square(2)	0.1533

Uji Autokorelasi, jika nilai Probability Obs*R-Squared < dari taraf nyata atau $\alpha = 5\%$, maka terdapat masalah autokorelasi. Sehingga hipotesis yang digunakan yakni sebagai berikut, H_0 = Tidak terjadi penyakit autokorelasi dan H_1 = Terjadi penyakit autokorelasi.

Berdasarkan tabel 5 diatas, diketahui bahwa nilai probabilitas Chi-Square sebesar 0.1533 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi masalah autokorelasi atau H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan

Sesuai dengan hasil penelitian ini, dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara dengan arah hubungan yang negatif. Artinya, jika jumlah penduduk mengalami kenaikan, maka tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara akan menurun. Hasil dari penelitian ini juga sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Diramita dan Umaruddin Usman, 2018), (Ratri, 2015), dan (Didu & Fauzi, 2016) yang menjelaskan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hubungan jumlah penduduk yang negatif terhadap kemiskinan mengimplikasikan bahwa tingkat kemiskinan dalam keadaan menurun meskipun jumlah penduduk dalam suatu wilayah bertambah banyak. Hasil penelitian ini juga didukung dengan adanya data tingkat kelahiran

penduduk Sumatera Utara yang lebih tinggi daripada tingkat kematiannya yang relatif lebih rendah.

Menurut Todaro dan Smith dalam (Ratri, 2015), ada sejumlah hal yang membuat penduduk dapat dikatakan sebagai faktor pendorong pembangunan dan mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Penduduk sebagai faktor pendorong pembangunan, dikarenakan jumlah penduduk yang lebih besar merupakan pasar potensial yang menjadi sumber permintaan barang dan jasa. Hal tersebut dapat mendorong bermacam-macam jenis kegiatan ekonomi, sehingga terciptanya skala ekonomi yang memberikan keuntungan bagi semua pihak, mengurangi biaya produksi, dan menyediakan tenaga kerja yang murah dengan jumlah yang cukup. Pada akhirnya, kegiatan ini akan meningkatkan output atau PDRB menjadi lebih tinggi, dan diharapkan mampu memajukan kesejahteraan masyarakat, sehingga tingkat kemiskinan juga akan menurun.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) memiliki arah hubungan positif dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara namun tidak terlalu berpengaruh atau pengaruhnya lemah. Hubungan positif tersebut menunjukkan bahwa, apabila pengangguran meningkat maka tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara juga akan naik, begitu juga sebaliknya. Hasil penelitian yang tidak signifikan tersebut tidak searah dengan teori Todaro yang menerangkan bahwa pengangguran sangat erat kaitannya dengan tingkat kemiskinan (Todaro, 2003). Namun, hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Zuhdiyati & David, 2015), (Safuridar & Natasya Ika, 2019), dan (Sayifullah & Gandasari, 2016) yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hubungan TPT yang tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan membuktikan bahwa penduduk yang menganggur belum tentu orang-orang yang berpendapatan rendah, atau mereka yang menganggur masih dibiayai oleh orang yang berpendapatan cukup. Selain itu, tidak semua pengangguran sementara itu selalu miskin.

Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan

Variabel Indeks Pembangunan Manusia ternyata memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara tahun 2001-2021. Hal ini sesuai dengan hipotesis awal penelitian. Dari hasil olah data regresi linear berganda diatas dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara. Dimana setiap kenaikan 1 persen maka akan mengakibatkan naiknya tingkat kemiskinan di Sumatera Utara sebesar 1, persen. Berdasarkan

hasil penelitian bahwa IPM memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemiskinan, maka salah satu upaya pemerintah yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan adalah dengan melakukan pembangunan manusia atau peningkatan SDM, karena SDM merupakan kunci utama dari pembangunan ekonomi itu sendiri.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera utara 2001 -2021, dapat ditarik kesimpulan : Variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2001-2021 dengan nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$, yaitu $6.030079 > 1.73961$ pada taraf signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara, dengan nilai $T_{hitung} < T_{tabel}$, yaitu $1.610168 < 1.73961$ pada taraf signifikansi sebesar $0,1258 > 0,05$. Variabel indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, dengan nilai $T_{hitung} < T_{tabel}$, yaitu $1.236686 < 1.73961$ pada taraf signifikansi sebesar $0,2330 > 0,05$. Variabel jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. tahun 2001-2021 dengan nilai F_{tabel} sebesar 3,24 dan F_{hitung} sebesar 33,88130. Dapat dinyatakan bahwa nilai f_{hitung} (33,88130) $> f_{tabel}$ (3,24) dan nilai Sig ($0,00 < 0,05$)

DAFTAR REFERENSI

- Bawono, A. (2006). *Multivariate analysis dengan SPSS*. STAIN Salatiga Press.
- Didu, S., & Fauzi, F. (2016). Pengaruh jumlah penduduk, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten Lebak. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(1), 102–117. <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i1.4199>
- Diramita, & Usman, U. (2018). Pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 1, 46–52.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 21 update PLS regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2017). *Model persamaan struktural konsep dan aplikasi program AMOS 24*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendra, O., Iain, S., & Abstrak, P. (2016). *Journal of Islamic Education Management*, 1(1).

- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi kemiskinan*. Bumi Aksara.
- Loayza, N., & Raddatz, C. (2006). *The composition of growth matters for poverty alleviation*. <http://econ.worldbank.org>
- Maipita, dkk. (2010). *Ekonomi kemiskinan*. UNIMED.
- Pamama, N. L. (2017). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara. *Ekonomikawan*, 1, 62–70.
- Pranata, O. R. (2013). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, dan inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 2009-2011. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang*. Retrieved from <https://fllib.unnes.ac.id>
- Putra, K. A. A., & Arka, S. (2018). Analisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka, kesempatan kerja, dan tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 7(3), 416–444. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id>
- Safuridar, N. I. P. (2019). Pengaruh indeks pembangunan manusia, pengangguran, dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Aceh bagian timur. 3(1), 34–46. <https://doi.org/10.1234/jse.v3i1.129>
- Said, R. (2012). *Pengantar ilmu kependudukan*. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial.
- Sayifullah, S., & Gandasari, T. R. (2016). Pengaruh indeks pembangunan manusia dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(2). <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i2.4345>
- Simanjuntak, P. J. (2003). *Produktivitas kerja: Pengertian dan ruang lingkupnya*. Prisma.
- Sukirno, S. (2008). *Makro ekonomi modern*. PT Raja Grafindo Persada.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2000). *Prinsip metodologi penelitian ilmiah*. Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2003). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga*. Erlangga.
- Zakaria, R. (2018). Pengaruh tingkat jumlah penduduk, pengangguran, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010–2016. *Jurnal Universitas Islam Indonesia*, 1, 1–19.
- Zuhdiyati, N., & David. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia selama lima tahun terakhir (studi kasus pada 33 provinsi). *Jurnal Ekonomi*, 11(2), 27–31.